

Istana Bantah Kabar Jokowi Minta Bertemu dengan Megawati

JAKARTA (IM) - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwiipayana, membantah kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ari menegaskan bahwa permintaan pertemuan itu tidak benar adanya. Dan hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pihak PDIP. "Nah, yang terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari bapak presiden untuk bertemu apalagi dihubungkan dengan pemilu 2024 itu sama sekali tidak benar. Dan itu sudah dikonfirmasi juga oleh sekretaris jenderal PDI Perjuangan, Mas Hasto yang mengatakan tidak benar ada permintaan untuk pertemuan," kata Ari dalam keterangannya, Senin (22/1).

Menurut Ari, selama ini Presiden Jokowi selalu ter-

buka melakukan pertemuan dengan para tokoh-tokoh bangsa.

"Kalau presiden kan selama ini terbuka bertemu dengan siapa saja tokoh-tokoh bangsa. Dan saya kira juga Bu Mega juga sama ya terbuka untuk bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa," katanya.

Namun Ari mengatakan, Jokowi pasti menerima jika ada usulan pertemuan Jokowi dengan Megawati, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Ya usulan Pak Hasto kan? ya tentu pertemuan itu antar tokoh kan. Saya kira sudah terbiasa untuk pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu dilakukan," ungkapnya.

Meski begitu, Ari mengaku belum mendapatkan informasi mengenai adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati ataupun tokoh-tokoh lainnya. ● han

KPK Cecar Sekjen Kemenhub soal Pengaturan Pemenang Lelang Proyek

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Novie Riyanto, soal pengaturan pemenang lelang proyek, saat diperiksa sebagai saksi pada Kamis (18/1) lalu.

Novie diperiksa sebagai saksi di gedung Merah Putih KPK. Ia dicecar soal pengetahuannya atas pengembangan penyidikan perkara dugaan suap DJKA di Kemenhub RI dengan tersangka dua ASN.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk beberapa proyek pengadaan di Kemenhub RI," ujar Ali, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dikutip dari keterangannya, Senin (22/1).

Penyidik juga mencecar Novie soal penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengaturan pemenang lelang proyek di lingkungan Kemenhub RI. "Disamping itu juga

dikonfirmasi terhadap saksi atas dugaan adanya pengaturan para pemenang lelang termasuk pengondisian temuan audit BPK," ujarnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan pengusaha M Suryo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan jalur kereta api pada DJKA.

Nama Suryo memang kerap disebut dalam sidang suap proyek pembangunan jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Suryo disebut sebagai makelar proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ia disebut sebagai pihak yang menerima aliran uang haram.

Dalam dakwaan terdakwa Putu Sumarjaya, Suryo disebut menerima uang haram dari proyek pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan - Kadipiro - KaliOSO KM. 96+400 sampai dengan KM. 104+900. Suryo disebut menerima uang Rp9,5 miliar dengan istilah 'sleeping fee' dari proyek tersebut. ● mei

Erick Thohir dan Maruarar Sirait Bergabung, Menambah Kekuatan Baru Prabowo - Gibran

JAKARTA (IM) - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat suntikan kekuatan baru dengan bergabungnya Menteri BUMN Erick Thohir dan eks politikus PDI-P Maruarar Sirait (Ara).

Keduanya baru-baru ini mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Gibran. Bahkan, Maruarar sampai memilih ke luar dari PDI-P demi mengikuti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Maruarar mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Gibran, dan langsung 'tancap gas' berkampanye bersama Prabowo di Majalengka, Jawa Barat. Sementara itu, Erick Thohir mengekklaim mendukung Prabowo-Gibran atas inisiatifnya sendiri.

"Saya dukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran karena saya yakin yang bisa melanjutkan hal baik Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) adalah Prabowo-Gibran," kata Maruarar Sirait, usai menemani Prabowo berkunjung ke kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (19/1) sore.

Prabowo Subianto mengajak Ara untuk bergabung ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, Ara harus menerima ajakannya itu lantaran dirinya sudah mendaulat. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat

menghadiri acara "Sehat Bersama untuk Indonesia Maju" di Lapangan GGM Majalengka, Minggu (21/1) pagi.

"Saya juga akan minta kesediaan Bung Ara untuk masuk Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran," ujar Prabowo dalam keterangannya.

"Dia belum menyatakan bersedia tapi saya sudah daulat dia. Harus terima! Jangan keras-keras jabat tangannya. Ini orang Batak keras banget (jabat tangan)," katanya lagi.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir tiba-tiba mendatangi rumah capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (21/1) sore. Erick pun menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran.

"Ya (gabung) ke 02. Saya milih beliau gimana? Beliau datang ke rumah saya kan waktu itu ingat? Ketemu keluarga saya. Dan saya bilang saya support beliau," ujar Erick di rumah Prabowo, Minggu (21/1).

Erick mengatakan, sudah saatnya dirinya mendukung satu pasangan calon (paslon) tertentu. Dia menyebut bahwa kedatangannya ke rumah Prabowo juga berdasarkan inisiatif sendiri.

"Ya terhormat lah. Karena kan kita memimpin masa depan yang jelas untuk kemajuan kita semua," kata Erick Thohir. "Inisiatif sendiri. Saya rasanya sudah waktunya. Sudah waktunya saya menentukan," ujar Erick. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PRABOWO BERTEMU SRI SULTAN HB X

Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan HB X (kedua kanan) didampingi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) memberikan keterangan wartawan se usai melakukan pertemuan di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (22/1). Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal salah satunya soal Pilpres 2024.

Wewenang Kejaksaan Harus Diperkuat Agar Lebih Berani Usut Korupsi Kakap

Kejagung telah membuktikan mampu menangani kasus-kasus besar korupsi, memiliki jangkauan hingga ke daerah, dan berkolaborasi dengan polisi.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pengurangan kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. Sebab, Kejaksaan diperlukan untuk memberantas praktik rasuah.

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzzakir, menilai, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) terbukti lebih unggul. Bahkan, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK kalah berkompetensi. Perkara-perkara besar

ditangani oleh Jaks. KPK lebih suka menangani yang OTT-OTT (Operasi Tangkap Tangan) itu," ujar Muzzakir dalam keterangannya, dikutip Senin (22/1).

Muzzakir menyampaikan bahwa pihaknya tidak setuju dengan pengurangan kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi, kecuali KPK mampu menuntukkan kelompok yang solid, valid, dan dapat dipercaya. Muzzakir juga mengkritisi beberapa kasus di KPK yang dianggapnya melanggar etika namun tidak ditindaklanjuti.

Menurutnya hal itu bisa

menciptakan keraguan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

"Komisioner melakukan gratifikasi di Lombok untuk melihat balap dibiarkan begitu saja. Sementara lembaga lain ditindak. Itulah kenapa KPK sekarang ini kurang dapat dipercaya," ujarnya.

Kejagung justru telah membuktikan kemampuannya dalam menangani kasus-kasus besar, memiliki jangkauan hingga ke daerah-daerah, dan berkolaborasi dengan polisi.

"Kejaksaan juga punya organ hingga ke daerah-daerah, seperti juga polisi. KPK tidak punya," katanya.

Dalam konteks pengembangan kerugian negara, Muzzakir mempertanyakan efisiensi KPK dengan menggambarkan biaya dan hasil dari sidang-sidang yang di-

lakukan oleh KPK terkait kasus korupsi di Yogyakarta. Persidangan sampai 20 kali, di mana sekali sidang yang datang 5 hingga 10 orang.

"Berapa biaya negaranya? Tapi berapa uang negara yang dikembalikan?" tutur Muzzakir.

Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana khusus, terutama korupsi, menurut Muzzakir memiliki sejarah panjang sejak berdirinya KU-HAP pada 1981.

Ia menyebut bahwa kepolisian dianggap belum memiliki keahlian khusus, sehingga Kejaksaan tetap diberi tugas menangani tindak pidana korupsi. Meskipun ada perubahan dalam UU Kejaksaan, kejaksaan tetap memegang kewenangan tersebut.

"Saat itu kepolisian dianggap belum cukup mampu untuk menangani karena perlu

keahlian khusus. Saat itu diberi jeda waktu dua tahun," katanya.

Muzzakir juga mencatat bahwa awal pembentukan KPK menetapkan syarat-syarat tertentu untuk kewenangan penyidikan korupsi. Namun, seiring perkembangan waktu, KPK membuka diri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri.

"Dan begitu dibuka (kewenangannya), dalam satu semester 60 ribu perkara yang diserahkan KPK. Karena ketidakmampuan KPK melakukan penyelidikan-penyidikan (dalam jumlah besar) lahir istilah OTT," tuturnya.

Dibanding kepolisian dan kejaksaan, menurut Muzzakir, KPK kala profesional. Hal itu disebabkan pengalaman yang lebih lama dimiliki oleh kedua lembaga tersebut. ● han

Anies Beri Nilai Performa 11 dari 10 Saat Debat Cawapres kepada Cak Imin



KAMPANYE ANIES BASWEDAN DI CIKARANG

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) menyampaikan orasi pada ampang akbar di Stadion mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/1). Kampanye akbar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tersebut dihadiri ribuan pendukungnya.

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memuji performanya saat debat presiden, Muhaimin

Iskandar. Menurutnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu banyak menyampaikan substansi yang diperlukan masyarakat saat

debat cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1).

"Kalau diperhatikan pesan-pesan yang disampaikan oleh

Gus Muhaimin itu daging. Bicara tentang lingkungan, bicara tentang reformasi agraria, bicara tentang ketahanan pangan itu disampaikan," ujar Anies di Stadion Mini, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/1).

Baginya, seseorang yang menguasai materi debat tidak perlu melakukan banyak gimik. Sebab, gimik kerap kali ditunjukkan untuk menutupi kelemahan karena tak menguasai materi debat.

"Gus Imin menyampaikan substansi, tidak perlu banyak atraksi karena memang substansinya sudah bagus. Kalau substansinya lemah nah baru atraksi itu dipakai untuk menutupi kelemahannya," ujarnya.

Anies pun nampak puas dengan penampilan Muhaimin menghadapi dua cawapres lainnya, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Ia mengaku memberikan nilai sempurna atas kinerja Muhaimin semalam. "Saya kasih (nilai) 11 deh, 11 dari 10," katanya.

Minta Relawan Bergerak Anggota Dewan Penasi-

hat Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Imam Jazuli meminta para relawan untuk fokus bergerak di akar rumput. Para relawan, terutama kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak perlu gentar dengan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Kita sudah tahu bahwa kekuatan NU itu berada di level masyarakat kulturalnya dalam sikap politik. Sementara, untuk NU struktural, kebanyakan berpikir pragmatis dan sesaat," ujar Imam dalam keterangannya, Senin (22/1).

Imam memberikan contoh Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004. Kala itu, pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla. Namun, Megawati-Hasyim mengalami kekalahan. Padahal, Hasyim kala itu merupakan Ketua Umum PBNU. "Semua peringkat NU struktural sudah dikerahkan untuk pemenangan, tapi apa hasilnya? Mega-Hasyim kalah," katanya. ● mei

Mahfud MD Kutip Lirik Lagu Ebiat G Ade dan Pesan Gus Dur Sebagai Closing Statement

JAKARTA (IM) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengutip syair lagu Ebiat G Ade dan pesan Gus Dur, saat memberikan closing statement Debat Keempat Pilpres 2024, di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

Mahfud kembali teringat kutipan surat Ar-Rum ayat 41 "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia..." yang dilanjutkan dengan lagu Ebiat G Ade.

"Saya teringat lagu Ebiat G Ade yang berbunyi begini: Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkat kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan pesan kepada kawan," ujar Mahfud.

Mahfud menambahkan masalah-masalah yang telah diperdebatkan sangat penting untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya lanjut Mahfud, adalah pedang hukum kita tumpul.

"Apabila pedang hukum kita tidak tumpul, kita bisa tabrak habis-habisan dan program pembangunan akan berjalan dengan baik," tegasnya.

Kemudian, Mahfud yang berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo itu menyampaikan permohonan maafnya kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat, atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan para cucu huni.

"Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan cucu," ujarnya.

Ganjar dan Mahfud, tambah dia, berjanji bahwa mereka akan mengembalikan secara bertahap hak rakyat, dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu.

Demikian halnya, Ganjar-Mahfud akan menagih kepada dunia internasional untuk



GANJAR HADIRI HAJATAN RAKYAT DI LAMPUNG SELATAN

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) menyapa pendukungnya saat menghadiri Hajatan Rakyat di Lapangan Expo, Lampung Selatan, Lampung, Senin (22/1). Kampanye terbuka tersebut diikuti ribuan massa simpatisan pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

membayar utang-utang yang telah merusak pembangunan. "Sebagai santri NU, saya

ingin mengutip dalil Gus Dur, Tasarruf al Imam manutun bil masalah, tugas pemercintah

terhadap rakyatnya adalah kesejahteraan, selesai," tuturnya. ● han